



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II**

Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, Telepon (022) 87835007, Faksimile (022) 87835008
Laman www.ppsdmregbandung.kemendagri.go.id, Pos-el ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id

1 April 2026

Nomor : 800.2.4.1/ 1805 /BBPKA-PDN II
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penawaran Diklat SPM Bidang Kebencanaan dan Sosial
Tahun Anggaran 2026

Yth. 1. Para Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Wilayah Kerja BBPKA-PDN II.
di

Tempat

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan sub-urusan bencana dan sosial sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, ditegaskan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan dasar bagi setiap warga negara yang berada di wilayah rawan bencana.

Namun dalam implementasinya, pencapaian target indikator sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM, yang mengatur tata cara pelaporan dan penerapan SPM secara keseluruhan seringkali terkendala oleh keterbatasan kompetensi teknis aparatur di lapangan.

Sehubungan hal tersebut, Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN II) Jatinangor yang merupakan UPT dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri, menawarkan kegiatan Diklat Penyusunan Dokumen Penganggaran SPM Bidang Kebencanaan dan Bidang Sosial guna meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan target pencapaian SPM.

Adapun tujuan penyelenggaraan diklat dimaksud adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman regulasi dan kebijakan terkait SPM bidang kebencanaan dan sosial.
2. Meningkatkan kemampuan teknis penyusunan dokumen SPM (pemetaan layanan dasar, indikator, target, dan kebutuhan anggaran).

3. Mensinergikan dokumen SPM dengan RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan dokumen penganggaran (RKA/DPA).
4. Memperkuat strategi pemenuhan SPM melalui perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Pelatihan dilaksanakan secara klasikal/tatap muka di BBPKA-PDN II Jatinangor, Jl. Kiarapayung KM 4,5 Jatinangor Sumedang, selama 5 hari diklat mulai tanggal 8 s.d.12 Juni 2026.

Untuk biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama pelatihan dibebankan pada DIPA BBPKA-PDN II Jatinangor Tahun Anggaran 2026, sedangkan untuk biaya transportasi PP serta uang saku peserta dibebankan pada DIPA Pemerintah Daerah masing-masing asal pengirim peserta.

Persyaratan dan tata cara pendaftaran diklat tercantum pada Lampiran surat ini. Informasi lainnya terkait penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dapat menghubungi Sdr. Aji Wiranata, S.IP. CP. (0813-2105-3432).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala BBPKA-PDN II pada BPSDM Kemendagri

Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198301042008121001

Tembusan :

1. Kepala BPSDM Kemendagri;
2. Sekretaris BPSDM Kemendagri; dan
3. Arsip.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN DIKLAT
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BBPKA-PDN II
TAHUN ANGGARN 2026**

- A.** Penyelenggaraan Diklat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2026 dibagi kedalam 2 kategori urusan yaitu:

No.	DIKLAT	Kuota	Ket
1.	Diklat SPM Bidang Kebencanaan	30 Peserta	
2.	Diklat SPM Bidang Sosial	30 Peserta	

B. Persyaratan Umum:

1. ASN atau personel yang menangani urusan kebencanaan dan sosial di instansi pemerintah daerah.
2. Pendidikan minimal SMA/ sederajat.
3. Diusulkan atau mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi/unit kerja.
4. Belum pernah mengikuti atau lulus pelatihan yang sama sebelumnya.
5. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan diklat sampai selesai (biasanya menandatangani surat komitmen).

C. Persyaratan Administrasi

1. Mengisi form registrasi sebagai berikut
 - a. SPM Kebencanaan
Link:
<https://tinyurl.com/SPMBidBencana>
 - b. SPM Bidang Sosial
Link:
<https://tinyurl.com/SPMBidSosial>
2. Surat tugas atau rekomendasi dari instansi.
3. Surat keterangan sehat dari klinik pemerintah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala BBPKA-PDN II pada BPSDM Kemendagri

Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198301042008121001